

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan fisik dan mental, pendidikan, standar hidup, akses terhadap layanan kesehatan, keadilan sosial, dan kesetaraan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dunia seringkali melibatkan kerja sama lintas sektor dan kerangka kerja global seperti *sustainable development goals* (SDGs) yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan secara luas dan inklusif.

Hubungan antara kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan kesejahteraan di dunia sangat erat dan kompleks. Indonesia merupakan satu negara yang terdampak dari kondisi kesejahteraan masyarakat, dan memiliki implikasi yang luas, baik secara regional maupun global. Kondisi kesejahteraan masyarakat di Indonesia, seperti akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi, ketahanan pangan domestik yang dapat memengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar global. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak hanya relevan bagi negara itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan pada kesejahteraan dan stabilitas di tingkat global. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mencapai kesejahteraan global yang berkelanjutan dan inklusif.

Kesejahteraan masyarakat di Indonesia mencakup sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan penduduk secara umum. Adapun beberapa poin yang relevan seperti Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan yang berkembang pesat, sementara sebagian besar populasi di pedesaan masih menghadapi tantangan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Kemudian dari segi pendidikan, meskipun tingkat partisipasi dalam pendidikan telah meningkat, masih ada tantangan dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Kesenjangan antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan serta antara daerah kaya dan miskin masih menjadi masalah serius. Selain itu, tantangan lainnya termasuk kualifikasi guru, fasilitas pendidikan yang belum memadai, dan kurangnya akses terhadap pendidikan tinggi.

Indonesia menghadapi tantangan dalam mencapai akses universal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, infrastruktur kesehatan yang memadai, dan akses terhadap obat-obatan masih menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deforestasi, pencemaran udara dan air, serta degradasi lahan menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian masalah-masalah seperti ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya untuk memperkuat ketahanan sosial dan mengurangi risiko terhadap bencana alam merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia sering bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat sebagai mitra pemerintahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat atau lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi.

Tujuan utama LPM adalah memberdayakan masyarakat untuk mengambil peranan aktif dalam pembangunan, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan menciptakan perubahan positif dalam komunitas mereka. Program-program ini mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan pemberdayaan perempuan. LPM dapat menjadi mitra strategis dalam membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Indonesia biasanya memberikan dana dan sumber daya kepada LPM dalam bentuk hibah, bantuan teknis, atau fasilitas lainnya untuk mendukung program-program mereka. Ini dapat mencakup dana operasional, bantuan teknis dalam pengelolaan program, atau akses terhadap infrastruktur dan fasilitas pemerintah. memiliki peranan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan LPM untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan regulasi dan

kebijakan yang berlaku. Hal ini mencakup pemberian izin operasional, pembentukan badan pengawas, dan pelaporan berkala tentang kegiatan dan pencapaian. LPM terus berperan dalam membantu masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan dan kemandirian melalui berbagai inisiatif, program, dan kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan.

Kota Medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 2.494.512 Juta Jiwa (BPS, 2023). Dan salah satu kecamatan yang paling sering disoroti yaitu Medan Belawan, hal ini juga didukung oleh Data Badan Pusat Statistik (2024) terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Medan yang menunjukkan Medan Belawan adalah angka terbanyak kedua yaitu sebesar 23.937 keluarga yang memerlukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Beberapa permasalahan kesejahteraan masyarakat yang dihadapi di daerah Medan Belawan, yang merupakan bagian dari Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, bisa mencakup kemiskinan masih menjadi masalah serius di Medan Belawan, terutama di antara kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran kota. Tingkat pengangguran yang tinggi dan minimnya lapangan kerja formal menyebabkan banyak penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas mungkin tidak merata di beberapa wilayah di Medan Belawan. Ketersediaan fasilitas kesehatan, aksesibilitas, dan biaya perawatan dapat menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah yang lebih terpencil.

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, masih ada tantangan dalam hal kualitas pendidikan dan kesenjangan akses pendidikan. Kurangnya fasilitas pendidikan, dan tingginya angka putus sekolah adalah beberapa masalah yang masih dihadapi. Kemudian masih banyaknya penduduk Medan Belawan tinggal di kawasan permukiman kumuh dengan infrastruktur yang tidak memadai dan ketersediaan perumahan yang layak. Kondisi perumahan yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan dan sosial, serta mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Permasalahan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan degradasi lingkungan juga bisa menjadi perhatian di Medan Belawan. Pertumbuhan industri dan perkotaan yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan upaya yang memadai dalam menjaga lingkungan hidup. Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat di Medan Belawan memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi dan kerjasama antar berbagai pihak menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Medan Belawan. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyusun rencana pembangunan di tingkat kelurahan, partisipatif dan menjalin kerjasama melalui kegiatan gotong-royong, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan.

Medan Belawan, sebagai kawasan strategis dengan pelabuhan yang sibuk dan beragam aktivitas ekonomi, seringkali dihadapkan pada tantangan tingginya angka kriminalitas. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan dan penciptaan

lapangan kerja, diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Maka LPM berupaya untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai upaya secara komprehensif, baik dari pemerintah, maupun masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Medan Belawan tidak mungkin dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan tugasnya dibidang pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi diperlukan kerjasama dengan Pemerintah lainnya. Terjalannya kerjasama yang baik diharapkan akan melahirkan program-program pembangunan yang baik pula. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya ditentukan sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah setempat serta kesadaran dan partisipasi masyarakat yang menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti secara lebih mendalam. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan?

2. Bagaimana Faktor Pendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan?
3. Bagaimana Faktor Penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan?

1.3 Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Medan Belawan, tidak mewakili seluruh wilayah yang ada di Indonesia. dan penelitian ini hanya diperoleh dari informan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Medan Belawan.

1.4 Tujuan Penelitian

Melihat dari judul dan perumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan;
2. Untuk menganalisis Faktor Pendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan;

3. Untuk menganalisis Faktor Penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi Publik, Program kreatif, Implementasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkannya pada fakta di lapangan. Melalui penelitian, peneliti dapat mengasah keterampilan analisis, pemecahan masalah, dan komunikasi.

- b. Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Medan Belawan

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak-pihak terkait dalam membuat dan menyempurnakan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Medan Belawan dalam meningkatkan kesejahteraan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis bukti kepada pembuat kebijakan.

c. Bagi Civitas Akademika di FISIP UISU

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Penelitian

2.1.1 Pemberdayaan

a. Definisi Pemberdayaan

Teori pemberdayaan (*empowerment theory*) merupakan pendekatan atau konsep yang memberikan fokus pada upaya untuk meningkatkan kekuatan, kontrol, dan kapasitas individu atau kelompok dalam masyarakat. Secara umum, teori pemberdayaan menekankan pentingnya memberikan masyarakat alat-alat, sumber daya, dan kesempatan untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri, baik secara individu maupun kolektif.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mengandung arti berdaya atau mampu. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan adalah usaha dalam hal meningkatkan kapabilitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut.¹ Pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memberikan daya (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan meminimalisir pihak yang terlalu menguasai.²

¹ Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana)

² Oos M Anwas. 2013. Pemberdayaan masyarakat di era global (Jakarta: Alfabeta)

Konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan 2 konsep utama yaitu konsep daya (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantage*). Pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu, terutama pada kelompok lemah sehingga kelompok tersebut memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan utamanya. Disisi lain mereka juga terbebas dari kelaparan, kemiskinan, kebodohan, serta mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan kebutuhan primer ataupun sekunder dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat.³

Dalam praktiknya, teori pemberdayaan digunakan sebagai kerangka kerja untuk merancang program-program pembangunan, inisiatif sosial, atau kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini menempatkan individu dan kelompok sebagai agen perubahan utama, dengan fokus pada peningkatan kontrol, keadilan, dan partisipasi dalam proses kehidupan sosial mereka.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi masyarakat sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep

³ Edi Suharto. 2005. Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung:Rifka Aditama)

mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya.⁴ Suhartini pada bukunya menyebutkan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin, yaitu:

- 1) Adanya peningkatan dalam bidang lingkungan baik dari segi fisik, sarana maupun prasarana kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- 2) Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk menumbuhkan kemampuan atau kreatifitas masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat;
- 3) Selain itu pemberdayaan juga memiliki tujuan lain yaitu untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan sehingga perekonomian keluarga terjamin.⁵

c. Indikator Pemberdayaan

Dalam mengetahui tujuan dari pemberdayaan secara praktik, maka perlu adanya indikator untuk membantu dalam mengetahui bahwa seseorang tersebut dapat dikatakan berdaya atau tidak. Perekonomian pada masyarakat dikatakan berdaya apabila termasuk dari salah satu atau beberapa dari variabel. Gunawan dalam bukunya menuliskan bahwa indikator dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Tingkat kepedulian masyarakat semakin meningkat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya;

⁴ Hilda Hidayatus Sibyan. 2018. Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Dusun Bulurejo Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

⁵ Riczi Bayu Andika Ainur Rachman. 2020. Peran Pemberdayaan Perempuan Difabel Dalam meningkatkan Kesejahteraan. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri)

- 2) Tingkat kemandirian masyarakat semakin meningkat yang ditandai dengan berkembangnya produktifitas anggota komunitas, permodalan yang semakin menguat, administrasi semakin baik;
- 3) Meningkatnya pendapatan keluarga kurang mampu dan dapat mencukupi kebutuhan dasar atau kondisi lainnya dapat menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dan tingkat distribusi pendapatan.⁶

2.1.2 Kesejahteraan

a. Definisi Kesejahteraan

Teori kesejahteraan adalah teori yang digunakan untuk memahami dan mengukur tingkat kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat secara umum. Teori ini melibatkan pemikiran dan penelitian tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan, mempertahankan, atau meningkatkan kesejahteraan seseorang atau kelompok dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Teori ini mencoba mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan. Kesejahteraan bisa mencakup berbagai aspek, seperti kehidupan yang memadai secara materi, kesehatan fisik dan mental yang baik, kebebasan, kesempatan untuk memenuhi potensi diri, dan kepuasan hidup secara keseluruhan.

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan

⁶ Gunawan Sumadiningrat. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama)

adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.⁷

b. Teori Kesejahteraan

Adapun indikator kesejahteraan menurut Basri Ikhwan A (2009) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan yakni sebagai berikut:

1) Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

2) Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penguninya.

⁷ Edi Suharto. 2015. Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat. (Bandung:PT Refika Pertama)

3) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam.

2.1.3 Peranan

a. Pengertian Peranan

Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁸

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan

⁸ R. Sutyo Bakir. 2009. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009

keinginan diri lingkungannya. Peranan secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁹

b. Jenis-Jenis Peranan

Adapun Jenis-jenis peranan menurut Soerjono (2002) adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem;
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁰

2.1.4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

a. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebuah entitas atau organisasi yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. LPM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan kualitas hidup mereka

⁹ Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press

¹⁰ Ibid, Soerjono Soekanto. 2002.

secara berkelanjutan. Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan ini dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.¹¹

Secara keseluruhan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berperan penting dalam mempromosikan kemandirian, partisipasi, dan perubahan positif dalam masyarakat. Pendekatan ini berpusat pada kebutuhan masyarakat dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara holistik dan berkelanjutan.

b. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011) adapun tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan mempunyai fungsi seperti:

- 1) Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam Pembangunan;
- 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

¹¹ Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media

- 4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Dalam fungsi ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- 5) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- 6) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.¹²

c. Indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mencerminkan aspek-aspek yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur kinerja dan dampak dari LPM dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011) terdapat indikator dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu:¹³

- 1) Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan, program, atau proses yang diprakarsai atau didukung oleh LPM. Indikator ini mencakup jumlah peserta, tingkat keterlibatan, dan ragamnya partisipasi dalam berbagai kegiatan;
- 2) Kapasitas Masyarakat: Kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya mereka sendiri. Indikator ini dapat mencakup

¹² Ibid. Bambang Trisantono Soemantri. 2011

¹³ Ibid. Bambang Trisantono Soemantri. 2011

peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian mereka;

- 3) **Kemandirian Ekonomi:** Kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola sumber daya ekonomi mereka sendiri. Indikator ini dapat meliputi peningkatan pendapatan rumah tangga, diversifikasi mata pencaharian, dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- 4) **Akses Terhadap Layanan Dasar:** Tingkat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Indikator ini mencerminkan kemampuan LPM untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik di komunitas tertentu;
- 5) **Perubahan Sosial:** Dampak positif yang dihasilkan oleh LPM dalam mengubah norma, nilai-nilai, dan perilaku sosial masyarakat menuju ke arah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Indikator ini dapat mencakup peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, perubahan dalam praktik-praktik tradisional yang merugikan, atau peningkatan dalam partisipasi politik;
- 6) **Kualitas Hubungan Sosial:** Peningkatan dalam kualitas hubungan sosial dan jaringan dukungan di antara masyarakat, yang memperkuat kapasitas mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Indikator ini dapat mencakup tingkat kepercayaan, solidaritas, dan saling mendukung di antara anggota masyarakat;
- 7) **Keberlanjutan Program:** Kemampuan LPM untuk memastikan bahwa manfaat dari program-programnya dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Indikator ini mencakup upaya untuk membangun kapasitas lokal, mengembangkan sumber daya yang dapat dipertahankan, dan membangun dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait.

Setiap indikator ini membantu dalam mengukur sejauh mana LPM telah berhasil dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Pemilihan indikator yang tepat dan pengumpulan data yang akurat merupakan langkah kunci dalam mengevaluasi dampak nyata dari LPM dalam masyarakat.

2.1.5 Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹⁴ Sedangkan dalam undang-undang republik indonesia No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar hidu layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁵ Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan, dan kesehatan yang murah dan berkaulitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya dengan tingkat batas tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi umum kehidupan yang baik bagi sebagian besar atau seluruh anggota suatu masyarakat. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup

¹⁴ Rudy Badaruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN,2012)

¹⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

individu dan kolektif dalam masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan.

b. Aspek – Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Adapun aspek - aspek kesejahteraan masyarakat menurut Rudy B (2012) yakni:

- 1) Aspek Ekonomi: Kesejahteraan ekonomi mencakup tingkat pendapatan, lapangan kerja yang layak, kestabilan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai bagi individu dan rumah tangga di dalam masyarakat;
- 2) Aspek Sosial: Ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu, perumahan yang layak, serta keamanan sosial dan keselamatan bagi anggota masyarakat;
- 3) Aspek Kesehatan: Kesejahteraan masyarakat juga melibatkan tingkat kesehatan fisik dan mental masyarakat secara keseluruhan, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan, sanitasi yang baik, serta pencegahan dan pengobatan penyakit;
- 4) Aspek Lingkungan: Hal ini mencakup kualitas lingkungan hidup, keberlanjutan ekologi, serta upaya untuk mempertahankan dan melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang;
- 5) Aspek Budaya dan Sosial: Kesejahteraan masyarakat juga melibatkan faktor-faktor budaya dan sosial seperti hubungan sosial yang kuat, norma dan nilai-nilai yang mendukung, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat bukan hanya tentang ukuran ekonomi, tetapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk hidup dengan cara yang bermartabat, merasa aman, memiliki akses terhadap sumber daya penting, dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sering kali menjadi tujuan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi, dengan berbagai kebijakan dan program dirancang untuk mencapai tujuan ini.

c. Dimensi dan Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa dimensi kesejahteraan masyarakat meliputi:

- 1) **Ekonomi:** Tingkat penghasilan, pekerjaan yang layak, dan akses ke peluang ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Masyarakat;
- 2) **Sosial:** Kualitas hubungan sosial, inklusivitas, dan keadilan sosial memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Ketidaksetaraan, diskriminasi, dan isolasi sosial dapat menghambat kesejahteraan social;
- 3) **Pendidikan:** Akses dan kualitas pendidikan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan keterampilan dan peluang, membuka pintu menuju pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatkan partisipasi dalam Masyarakat;
- 4) **Kesehatan:** Akses ke layanan kesehatan yang baik, kebersihan lingkungan, dan pola hidup sehat semuanya berperan dalam menentukan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat;

- 5) Lingkungan Hidup: Keseimbangan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan kesadaran terhadap masalah lingkungan berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat;
- 6) Keamanan dan Keadilan: Keamanan masyarakat, baik itu keamanan fisik maupun keamanan dari ancaman ekonomi atau sosial, berdampak pada kesejahteraan. Selain itu, keadilan dalam sistem hukum dan distribusi kekayaan juga relevan untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Kesejahteraan masyarakat tidak selalu dapat diukur dengan indikator ekonomi semata, tetapi melibatkan evaluasi holistik yang mencakup banyak aspek kehidupan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering melibatkan kebijakan publik, program pembangunan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan perubahan positif.

Kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan beberapa ahli. Menurut *world bank*, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*increase in property*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*increase in infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*)¹⁷

Menurut Rudy B (2012) kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

¹⁶ Badan Pusat Statistik tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021

¹⁷ Ibid. Rudy Badaruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*. 2012

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya;
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Adapun beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut Devani A (2016) meliputi:

- 1) Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota- anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material.

Indikator pendapatan dibedakan menjadi 3 item

- Tinggi >Rp.5.000.000
- Sedang Rp.1.000.000-Rp.5.000.000
- Rendah <Rp.1.000.000

- 2) Konsumsi pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makan terhadap selirih pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan

rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan tingkat rumah tangga, makin kecil pengeluaran proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk atau keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk non makanan kurang < 80% dari pendapatan.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama dengan orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan kemajuan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang hasil kewajiban untuk memenuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa praktisime dan sebagainya. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam standar kesejahteraan adalah wajib berkisar 9 tahun.

4) Perumahan

Dalam data statistik perumahan dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut Biro Pusat Statistik (BPS)

dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding lantai dan atap baik. Bangunan yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantai 10 m dan bagian terluas dari rumah bukan tanah. Status penguasaan tempat milik sendiri.

5) Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk membandingkan pembangunan sumberdaya manusia antar negara adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). indeks tersebut merupakan indikator komposit yang terdiri dari indikator kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Pendidikan (angka melek huruf). Serta ekonomi (pengeluaran riil perkapita).¹⁸

¹⁸ Devani Ariesta Sari. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandar Lampung", (Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomidan Bisnis, Universitas Lampung)

d. Faktor Penghambat Kesejahteraan Masyarakat

Faktor penghambat kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek yang dapat menghambat perkembangan dan kualitas hidup masyarakat. Adanya kendala atau tantangan dalam berbagai sektor dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan. Berikut adalah beberapa faktor penghambat kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal yang menghambat kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut Nugraha, Ningsih. Dkk (2016) menyatakan faktor penghambat dari kesejahteraan, sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan yang tidak memadai;
- 2) Perbedaan paradigma antar sumber daya manusia yang ada;
- 3) Muncul potensi pengelolaan dana yang tidak sesuai (penyimpangan dana); dan
- 4) Menyusun pelaporan keuangan yang belum memadai.¹⁹

Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini seringkali saling terkait dan memerlukan pendekatan holistik untuk penyelesaiannya. Upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini sering melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

2.1.6 Peran Fasilitator

Peran fasilitator yaitu memandu diskusi, memberikan informasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Dan fokusnya membantu

¹⁹Nugraha, Ningsih Dkk. 2016. Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.16.(1).37-45

proses pembelajaran dan pengembangan.²⁰ Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.²¹ Mengingat fungsi LPM sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat dibidang pembangunan maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan yang dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana/pembangunan/Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan para pelaku pembangunan tujuan, musrenbang antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan;
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan);

²⁰ Minarni. 2014. Evaluasi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013), Vol 7/ No 2

²¹ Sutoro Eko, (2002), Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

- e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya Masyarakat;
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan keforum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APPBD Kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

2.1.7 Peran Dinamisor

Peran dinamisor yaitu memulai inisiatif, mendorong partisipasi, dan menciptakan suasana yang dinamis. Dan fokusnya menciptakan perubahan dan gerakan.²² Bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan dimasyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ialah berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik ditanah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).²³

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan

²² Ibid, Minarni (2014)

²³ Ibid, Sutoro (2002)

sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

2.1.8 Peran Mediator

Peran Mediator yaitu memfasilitasi komunikasi, mencari solusi bersama, dan menjaga hubungan antar pihak. Dan fokusnya menjembatani perbedaan dan menyelesaikan konflik.²⁴ Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang diperlukan keberadaannya dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Kecamatan. Adapaun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan. LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat. Kondisi geografis yang menjadi penyebab hambatannya pembangunan dan rentannya bencana alam memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembangunan kecamatan.

²⁴ Ibid Minarni (2014)

2.1.9 Peran Motivator

Peran Motivator yaitu memberikan dorongan, inspirasi, dan dukungan kepada orang lain. Dan fokusnya Meningkatkan semangat dan antusiasme. Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat.²⁵ Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada didesa atau kelurahan, kecamatan bahkan tingkat kabupaten atau kota. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik kesiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat prnting dan strategis. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan dirinya sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara structural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan Negara atau cita- cita bangsa Indonesia (Hawawi, Handari; 1988).²⁶

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat

²⁵ Ibid Minarni (2014)

²⁶ Nawawi, Handari. 1988. Administrasi Pendidikan, Jakarta: Gunung Agung.

sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan berguna untuk memberikan gambaran dan memperjelas kerangka berpikir dalam pembahasan. Disamping itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Implementasi Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Taman Kota Madiun	Isyabillilah Exzax,dkk. (2023)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a. Program kerja yang telah dibuat dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pendidikan pelatihan sosial masyarakat dan bidang sosial budaya, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat; b. Implementasi dan pelaksanaan program dan fungsi LPMK dilaksanakan dengan melaksanakan pemberdayaan

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
			<p>masyarakat namun dalam melaksanakan program kerja terdapat beberapa kendala yang dialami;</p> <p>c. Efektivitas pelaksanaan program kerja LPMK kurang dapat dilaksanakan secara optimal karena terdapat beberapa kendala yang dialami dan juga terdapat beberapa program kerja yang dirasakan kurang oleh masyarakat.²⁷</p>
2	<p>Sosialisasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pembangunan Desa Berbasis Lokalitas Adat Kabupaten Bulukumba.</p>	<p>Risfaisal, dkk. (2023)</p>	<p>Hasil Pengabdian menunjukkan bahwa pentingnya melakukan sosialisasi peran LPM Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang sebagai media komunikasi, informasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat setempat mengenai pentingnya LPM untuk terus diberdayakan dan dikembangkan. Selain itu juga terjadi peningkatan strategi dan metode dalam pelaksanaan</p>

²⁷ Isyabillilah Exzax, dkk. 2023. Implementasi Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Taman Kota Madiun. *Journal of Education, Society, and Culture*. Vol 12, No 1

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
			pengembangan budaya lokalitas adat. ²⁸
3	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Sanjaya Sopiyan dkk. (2021)	Hasil penelitian, Implementasi peran dan fungsi LPMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dwi Tunggal Jaya yaitu dalam menampung aspirasi dan penyaluran aspirasi masyarakat, penggerak gotong royong serta pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup, berjalan dengan baik serta pengimplementasian aturan yang ada. ²⁹
4	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa	Azis Fatimah Dkk. (2021)	Hasil penelitian di lapangan peneliti dapat melihat bahwa, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Sabalana yaitu ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah menjalankan peran tugas dan fungsinya dalam mengerjakan

²⁸ Risfaisal, dkk. 2023. Sosialisasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pembangunan Desa Berbasis Lokalitas Adat Kabupaten Bulukumba. Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti. Vol 4, No 3

²⁹ Sanjaya Sopiyan dkk. 2021. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol 1, No 2

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
			<p>setiap pembangunan yang di lakukan di Desa Sabalana namun belum terlalu efektif. Faktor pendukung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yaitu sumber daya yang di miliki oleh aparatur Desa, selalu adakan rapat koordinasi. Faktor penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yaitu transportasi laut dan kurangnya partisipasi masyarakat Desa dalam membantu pemerintah desa dan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mengerjakan setiap pembangunan yang ada. Keberhasilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sabalana, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa, ketua LPM dengan masyarakat Desa.³⁰</p>
5	Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Muhtarom Abid. (2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa fungsi yang

³⁰ Azis Fatimah Dkk. 2021. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial. Vol 1, No 2

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
	<p>dalam Pembangunan di Desa Kabupaten Lamongan</p>		<p>baik untuk dijalankan guna meningkatkan pembangunan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; b. Menanamkan pengertian dan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan Pancasila; c. Menggali, memanfaatkan, potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk membangun; d. Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri; e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat; f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; g. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa untuk menciptakan ketahanan yang mapan. Adapun Kendala-kendala yang timbul dalam

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
			<p>pelaksanaan fungsi dan peranannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak adanya Pelaksanaan sistem manajemen yang baik; 2) Kurang Adanya keterbukaan dalam informasi; 3) Adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/ Nepotisme, Tetapi untuk fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dapat dilaksanakan namun masih kurang efektif. <p>Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga,</p>

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
			mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. ³¹

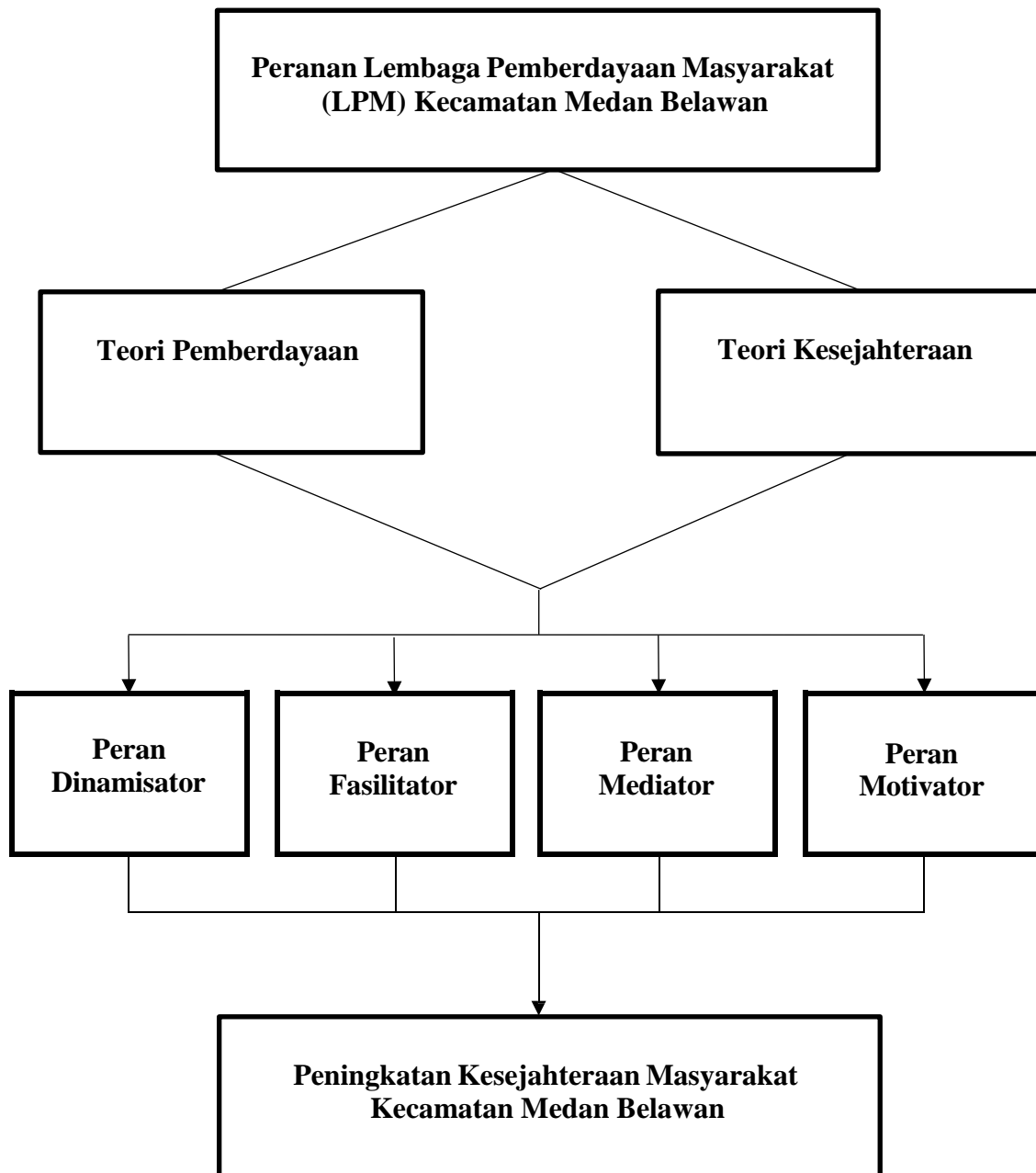
Sumber: Penelitian (2024)

2.3 Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono (2019) Kerangka konseptual adalah suatu pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang di lakukan³². Lebih jelasnya kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

³¹ Muhtarom Abid. 2016. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. Vol 1, No 3

³² Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta



Sumber: Penelitian (2024)

Gambar 2.1
Kerangka Konsep

2.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pemakaian istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan secara singkat tentang penegasan istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi
Pemberdayaan	Pemberdayaan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu, kelompok, atau komunitas. Ini melibatkan pemberian sumber daya, pengetahuan, dan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mengambil kendali atas hidup mereka sendiri, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan mereka.
Kesejahteraan	Kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat merasa puas dan bahagia karena kebutuhan dasar mereka terpenuhi, baik itu kebutuhan fisik, sosial, maupun psikologis. Kesejahteraan juga mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang mendukung kualitas hidup yang baik.

Sumber: Penelitian (2024)